

## DAFTAR APP DAN APPD BPKP JABAR TAHUN 2023

BIDWAS	KATEGORI	NAMA PKPT	RMP	RPL
APD	APP	Akuntabilitas Aset Desa	5	6
		Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat	5,11	6,12
		Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa	2,3,8,11	3,6,9,12
		Pengawasan atas Akuntabilitas Penanganan COVID-19 terkait Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah yang menangani COVID-19 Tahun 2023	2	3
		Pengawasan atas Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	2	3
		Pengawasan atas Dukungan Pengembangan Pariwisata	2	3
		Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	2,5,8,11	3,6,9,12
		Pengawasan atas Implementasi Bansos APBD	11	12
		Pengawasan atas Produktivitas dan Daya Saing UMKM Daerah	2	3
		Pengawasan atas Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	2	3
		Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	8	9
		Pengawasan Efektivitas Dana Transfer Umum	8	9
		Pengawasan Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Pemda Kabupaten/Kota	9	11
		Pengawasan Implementasi Bansos APBDesa di Jawa Barat	10	12
		Pengawasan Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah	9	12
		Pengawasan Optimalisasi PAD, Monitoring OPAD, Pengawasan Aset Strategis	5,8,9,12	6,9,12
		Pengawasan P3DN Pemerintah Daerah	6,9	6,9
		Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN) di Pemda Kab/Kota	2	3
		Pengawasan Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	5	6
		Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	2	3
		Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting Pemda Kab/Kota di Jawa Barat	5	6
		Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	3,6,9,12	3,6,9,12
		Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	5	6
		Pengelolaan Risiko Sektor Strategis Nasional	1	11
	APPD	Program Gerakan Membangun Desa dalam rangka pembangunan Desa yang Mandiri di Wilayah Provinsi Jawa Barat	1	3
		Program Petani Milenial Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat	7	9
AN	APP	Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM (CSR BUMN)	2	3
		Pengawasan atas Akuntabilitas BLUD Kesehatan	4	6
		Pengawasan atas Akuntabilitas BUMD (BPD)	5	8
		Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN	4	6
		Pengawasan atas Akuntabilitas Penanganan Covid-19 (Klaim RS dan Vaksin)	3	3
		Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu (Bidang AN)	2	3
		Pengawasan atas BUMD Jasa Air	4	6
		Pengawasan atas BUMN di Jawa Barat	4	6
		Pengawasan atas Efisiensi Industri Pupuk Nasional	7	9
		Pengawasan atas Infrastruktur Jalan Tol pada BUMN	3	5,11
		Pengawasan atas Infrastruktur SPAM pada BU Jasa Air di Jawa Barat	3	5,7,10,12
		Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha	1,4,7,9	3,6,9,12
		Pengawasan atas Penyelenggaraan Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Rujukan pada BLUD Kesehatan	5	6
		Pengawasan atas Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional pada BLUD Kesehatan	5	6
		Pengawasan BUMD Aneka Usaha	1	6
		Pengawasan Kinerja BLU Perguruan Tinggi	7	8
		Pengawasan P3DN pada BLU/D dan BUMD di Jawa Barat	2	5,8
		Pengawasan pembangunan bandara	4,1	6,12
		Pengawasan tata kelola cadangan pangan pusat	8	9
		Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM BUMD	2	3
INV	APP	Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu Bidang Inv.	3	3
		Pengawasan atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	4	6,9,12
		Pengawasan atas P3DN	1	2,5,8,12
		Pengawasan atas Penanggulangan Hama dan Penyakit	7	9
		Pengawasan atas Peningkatan Produksi Pakan Ternak	8	9
		Pengawasan atas Reforma Agraria	1	3

BIDWAS	KATEGORI	NAMA PKPT	RMP	RPL
		Pengawasan atas Supply Chain Komoditas Pangan	7	9
		Pengawasan atas Tata Kelola Pupuk Nasional	7	9
		Pengawasan atas Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	2,8	3,9
		Pengawasan Penanganan Pasca Panen	7	9
		Pengawasan Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional	7	9
		Pengawasan terhadap Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	1	3,9
		Pengawasan terhadap Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional	7	9
		Pengawasan terhadap Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan	7	9
IPP	APP	Evaluasi Pemajuan Kebudayaan pada Daerah A	7	8
		Evaluasi Percepatan Penurunan stunting tahun 2023 di Jawa Barat	4	4
		Pengawasan Akuntabilitas Anggaran Pemilu di Jawa Barat (Bidang IPP2)	2,11	3,12
		Pengawasan Akuntabilitas Penanganan Covid-19 di Jawa Barat	2	3
		Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM	2	3
		Pengawasan atas Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu dan Pemilukada di Jawa Barat	5	6
		Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	11	12
		Pengawasan atas Infrastruktur SPAM di Jawa Barat	4,1	5,11
		Pengawasan atas Kinerja Pendidikan Tinggi di Jawa Barat	7	9
		Pengawasan atas Pembangunan Bandara di Jawa Barat	4,11	6,11
		Pengawasan atas Pembangunan Insfrastruktur Kereta di Jawa Barat	4,1	6,11
		Pengawasan atas Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI) pada Pemerintah Provinsi	2	3
		Pengawasan atas Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur Akses Internet dan Komunikasi	4,1	6,12
		Pengawasan atas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	7	9
		Pengawasan atas Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada BPS Kab/Kota	8	9
		Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah di Jawa Barat	3	3
		Pengawasan Bauran Program Kesejahteraan Sosial	2,5,8,11	3,6,9,12
		Pengawasan Dukungan Pengembangan Pariwisata di Jawa Barat	2	3
		Pengawasan Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi	4,1	5,12
		Pengawasan Instrastruktur Jalan Tol	3,1	5,11
		Pengawasan Kemudahan Perizinan Berusaha di Jawa Barat	7	9
		Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata (DPSP dan KSPN)	2	3
		Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Jawa Barat	7	9
		Pengawasan Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit di Jawa Barat	4	5
		Pengawasan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	1	3
		Pengawasan Penyediaan Insfrastruktur Pusat Data Nasional	1	2
		Pengawasan Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	4,1	5,11
		Pengawasan reformasi sistem Kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	4	6
		Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Primer	5	6
		Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Rujukan	5	6
		Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan di Jawa Barat	4	6
		Pengawasan Sistem Kesehatan Nasional di Jawa Barat	4	6
		Pengawasan Skema Kesehatan Adatif	4	6
		Pengawasan Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata di Jawa Barat	1	3
		Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan)	5	6
		Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	8	9
		Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Diversifikasi Pangan	8	9
		Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul	8	9
P3A	APP	Bimtek/Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah	1	10,12



**RENCANA AKSI TAHUN 2023**  
**PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : OT.04/LPP-33/PW10/6/2023**  
**TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023**

**Jl. Raya Cibeureum No. 50, Kel. Campaka, Kec. Andir, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40184**



**RENCANA AKSI  
TAHUN 2023  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : OT.04/LPP-33/PW10/6/2023  
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dan Renstra BPKP Tahun 2020-2024 serta arahan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Semoga Rencana Aksi ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Rencana Aksi Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Kepala Perwakilan

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Samono

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Dasar Hukum .....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Ruang Lingkup .....	7
<b>BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN.....</b>	<b>8</b>
A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
B. Sumber Daya Manusia.....	12
C. Sarana Pendukung .....	13
D. Kinerja Pelayanan .....	14
<b>BAB III RENCANA AKSI TAHUN 2023.....</b>	<b>17</b>
A. Visi dan Misi .....	17
B. Tujuan dan Sasaran.....	17
C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2023.....	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN MATRIK RENCANA AKSI PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 .....</b>	<b>hal 1 - 17</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jenjang Pendidikan.....	12
------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Komposisi SDM.....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana.....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 2.3 Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Jawa Barat Tahun 2023....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 3.1 Target Sasaran Kegiatan Ketatausahaan.....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3.2 Target Sasaran Kegiatan Tahun 2020-2024.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 3.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 3.4 Agenda Prioritas Pengawasan (APP).....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 3.5 Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD).....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 3.6 DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.....</b>	<b>32</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berkualitas kepada mitra kerja (*stakeholder*), sampai kepada adanya pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional, kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN.

Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Dasar Hukum**

Beberapa dasar hukum pokok yang dipergunakan dalam penyusunan Renaksi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024.
7. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 Nomor KEP-397/PW10/1/2020.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

## BAB II

### GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

#### A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Organisasi BPKP ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas dan fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan:

1. Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh Presiden, serta
2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengkoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

**Fungsi pertama** meliputi:

1. Fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan,
2. Fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

**Fungsi kedua** berupa pengawasan intern yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
3. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

- penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
5. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, dibentuk Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang dibantu oleh Kepala Bagian Umum dan sembilan Koordinator Pengawasan (Korwas) yaitu:

1. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
2. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I, bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah;
4. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah II, bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan pembangunan daerah;

5. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara I, bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan;
6. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara II, bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang keakuntannegaraan;
7. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi I, bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian;
8. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi II, bertugas melaksanakan kegiatan keinvestigasian; dan
9. Korwas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan perwakilan serta kegiatan pembinaan APIP.

Selain itu, Kepala Bagian Umum dibantu oleh 3 Sub Koordinator, yaitu:

1. Subkoordinator Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Bagian Umum, dan anggaran perwakilan serta pengelolaan urusan keuangan;
2. Subkoordinator Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai serta penyusunan laporan Bagian Umum dan laporan Program Pelatihan Mandiri Perwakilan; dan
3. Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga dan Kearsipan, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan pengelolaan perpustakaan.

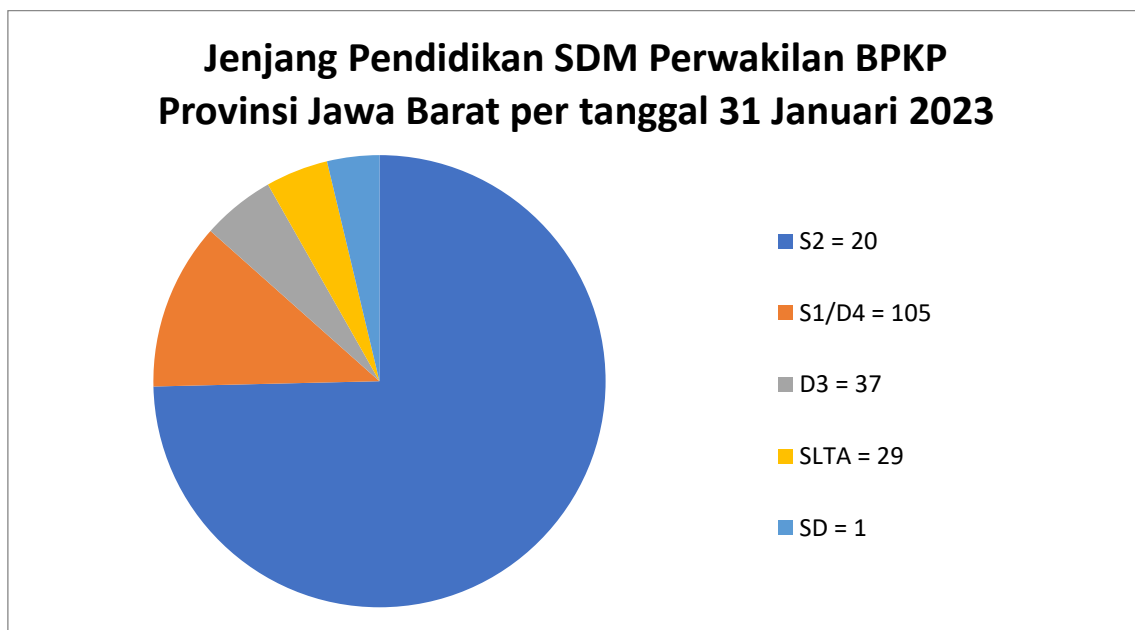
## B. Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat per 31 Januari 2023 sebanyak 192 orang dengan komposisi dan jenjang pendidikan pegawai adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Komposisi SDM**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Struktural	2
2.	Non Struktural/Fungsional:	11
	a. Koordinator Pengawasan	8
	b. Subkoordinator Pengawasan	3
3.	Pejabat Fungsional Auditor:	136
	a. Auditor Madya	37
	b. Auditor Muda	55
	c. Auditor Pertama	9
	d. Auditor Penyelia	23
	e. Auditor Pelaksana Lanjutan	10
	f. Auditor Pelaksana	2
4.	Pejabat Fungsional Umum:	43
	a. Analisis Kepegawaian	1
	b. Pranata Komputer	2
	c. Arsiparis	1
	d. Pranata Keuangan APBN	2
	e. Fungsional Umum	37

**Gambar 3.1 Jenjang Pendidikan SDM**





### C. Sarana Pendukung

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi unit kerja. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat per 31 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana**

NO	SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH (Unit/m2)	KONDISI	
				Baik	Kurang Baik
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin				
	1.1	Alat Bantu	10	10	-
	1.2	Alat Angkutan Darat Bermotor	18	18	-
	1.3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	2	-
	1.4	Alat Bengkel Bermesin	3	3	-
	1.5	Alat Pengolahan	3	3	-
	1.6	Alat Kantor	579	579	-
	1.7	Alat Rumah Tangga	1.775	1.775	-
	1.8	Alat Studio	63	63	-
	1.9	Alat Komunikasi	47	47	-
	1.10	Alat Kedokteran	19	19	-
	1.11	Alat Laboratorium Fisika	1	1	-
	1.12	Alat Khusus Kepolisian	3	3	-
	1.13	Komputer Unit	153	153	-
	1.14	Peralatan Komputer	126	126	-
	1.15	Alat SAR	1	1	-
2	Gedung dan Bangunan				
	2.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28	28	-
	2.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	75	75	-
	2.3	Tugu/Tanda Batas	1	1	-
3	Jalan dan Jembatan *)		4.708	4.708	-
4	Jaringan Listrik		1	1	-
5	Aset Tetap Lainnya				
	5.1	Bahan Perpustakaan Tercetak	1.706	1.706	-
	5.2	Barang Bercocok Kesenian	7	1	6
	5.3	Alat Bercocok Kebudayaan	1	1	-

Keterangan:

Satuan yang dipergunakan pada kolom (3) adalah **unit** kecuali yang bertanda \*) menggunakan **m2**.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum sarana dan prasarana di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berada dalam kondisi yang baik.

#### D. Kinerja Pelayanan

Hasil capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 atas 6 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 36 indikator kinerja, menunjukkan bahwa 32 indikator kinerja (88,89%) telah mencapai target dan 4 (empat) indikator kinerja (11,11%) belum mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada **tabel 2.3**.

**Tabel 2.3 Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Jawa Barat  
Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)
<b>I</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah</b>					
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.164	111.527	5.153,76	●
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.543.283	1.580.339	102,40	●
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	22.000	34.790	158,14	●
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional</b>					
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	85	100,00	●
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100,00	●
2.3	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	Persen	80	80	100,00	●
<b>III</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha</b>					
3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	3	4	133,33	●
3.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	23	23	100,00	●

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)
3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	6	6	100,00	●
3.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	193	193	100,00	●
3.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2	4	200,00	●
3.6	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	2	200,00	●
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>					
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	●
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80	80	100,00	●
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	4	0	0,00	●
4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti <i>Area of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	1	100,00	●
<b>V</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU</b>					
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Prov	1	1	100,00	●
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Kab/kota	9	11	122,22	●
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Prov	1	1	100,00	●
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kab/kota	18	20	111,11	●
5.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/kota	3	5	166,67	●
5.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Jumlah	9	8	88,89	●
5.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	20	100,00	●
5.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20	31	155,00	●

No	Sasaran Kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)
5.9	Jumlah BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	BUMN	3	3	100,00	●
5.10	Jumlah BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	BUMD	2	2	100,00	●
5.11	Jumlah BLU/D dengan MRI $\geq$ Level 3	BLU/D	10	5	50,00	●
5.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	BUMD	2	2	100,00	●
5.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI $\geq$ Level 3	BLU/D	1	1	100,00	●
<b>VI Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja</b>						
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	74,09	98,79	●
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	86,35	105,30	●
6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	82,46	117,80	●
6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	0,00	●
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	76,71	102,28	●
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	98,69	103,88	●
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	96,5	120,63	●

Keterangan: penjelasan atas kolom (7)

- = mencapai/melampaui target.
- = belum mencapai target.

## BAB III

### RENCANA AKSI TAHUN 2023

#### A. Visi dan Misi

BPKP yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden memiliki visi yaitu menjadi Auditor Internal Pemerintah berkelas dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk meningkatkan *Good Governance* sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.” Untuk mencapai visinya, BPKP mengemban dua misi sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

#### B. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPKP, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat menetapkan dua tujuan dengan enam sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program, yang diperoleh dari *output-output* kegiatan yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Enam sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BPKP periode 2020-2024, yakni:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah;
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha;
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi;
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU;
6. Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, sesuai Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 memiliki dua Program yaitu:

**Program 01: Program Dukungan Manajemen**, dengan 6 sasaran program, yakni:

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola;
- b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja BPKP;
- c. Meningkatnya reputasi;
- d. Meningkatnya efektivitas pengendalian internal;
- e. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan;
- f. Mewujudkan unit kerja percontohan yang bebas korupsi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai program tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam mendukung Program 01: Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan **dengan 14 indikator kinerja kegiatan**, dengan rincian sebagaimana tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Target Sasaran Kegiatan Ketatausahaan  
(Program 01: Program Dukungan Manajemen)**

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perwakilan BPKP					
		Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja</b>							
<b>I</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja</b>						
1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja <i>(Nilai minimal yang mendukung target nilai RB BPKP)</i>		75	76	77	78	79
2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi		100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu <i>(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)</i>		100%	100%	100%	100%	100%
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Unit Kerja</b>						
4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja <i>(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)</i>		100%	100%	100%	100%	100%
5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)		86	87	88	89	90
6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu <i>(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)</i>		90%	91%	92%	93%	95%
7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri) <i>(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)</i>		1	1	1	1	1
8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) <i>(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)</i>		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
9	Nilai SAKIP Unit Kerja <i>(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)</i>		80	81	82	83	84

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perwakilan BPKP					
		Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
<b>III</b>	<b>Meningkatnya Reputasi Unit Kerja</b>						
10	Nilai Reputasi Unit Kerja (khusus unit Perwakilan)						
	(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)						
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Intern Unit Kerja</b>						
11	Maturitas SPIP Unit Kerja		Lv. 3	Lv. 3	Lv. 3	Lv. 3	Lv. 4
	(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)						
12	Indeks MR Unit Kerja	-	-	Lv. 3	Lv. 3	Lv. 3	Lv. 4
	(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)						
<b>V</b>	<b>Meningkatnya Kepuasan Layanan Unit Kerja</b>						
13	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja		70	76	80	81	82
	(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)						
14	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)		70	73	76	80	81
	(Nilai minimal yang mendukung target level BPKP)						

**Program 06: Program Pengawasan Pembangunan**, dengan sasaran program sebanyak 19 yang tersebar di 5 Kedeputian.

Untuk mencapai program tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam mendukung program 06 (Program Pengawasan Pembangunan) melalui kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan yang memiliki 5 sasaran kegiatan dengan 36 indikator kinerja kegiatan** dengan rincian sebagaimana tabel 3.2 berikut:



**Tabel 3.2 Target Sasaran Kegiatan Tahun 2020-2024  
(Program 06 : Program Pengawasan Pembangunan)**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					
			Sifat	2020	2021	2022	2023	2024
SS1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	<b>IKK1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi</b>	Tidak Kumulatif	374	897	1.122	1.256	1.346
		Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi	Tidak Kumulatif	-	-	-	-	-
		Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD	Tidak Kumulatif	374	897	1.122	1.256	1.346
		<b>IKK2: Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi</b>	Tidak Kumulatif	748	1.495	1.869	2.093	2.243
		Potensi Penerimaan Negara yang Dioptimalisasi	Tidak Kumulatif	-	-	-	-	-
		Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah	Tidak Kumulatif	748	1.495	1.869	2.093	2.243
		<b>IKK3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah</b>	Tidak Kumulatif	2.246	188.130	155.996	137.919	114.799
		Nilai efisiensi pengeluaran Pemerintah Daerah	Tidak Kumulatif	-	185.428	152.978	134.621	111.062
		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Tidak Kumulatif	2.246	2.702	3.018	3.298	3.736
		<b>IKK4: Nilai penyelamatan keuangan</b>	Tidak Kumulatif	54.249	81.357	99.430	113.000	103.964

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					
			Sifat	2020	2021	2022	2023	2024
		Negara						
		IKK5: Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Tidak Kumulatif	-	118	120	122	125
		IKK6: Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Tidak Kumulatif	-	59	60	61	62
<b>SS2</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional</b>	IKK7: Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Tidak Kumulatif	0	2	0	0	0
		IKK8: Jumlah KP yang diawasi	Tidak Kumulatif	9	9	9	9	9
		IKK9: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Tidak Kumulatif	9	9	9	9	9
		IKK10: Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	0
		IKK11: Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Tidak Kumulatif	0	1	1	1	1
		IKK12: Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Tidak Kumulatif	0,00%	16,67%	33,33%	41,67%	58,33%
		IKK13: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Tidak Kumulatif	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%
<b>SS3</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan</b>	IKK14: Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya	Kumulatif	3	3	3	3	4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					
			Sifat	2020	2021	2022	2023	2024
	Usaha	baik						
		Persentase BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	Kumulatif	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%	50,00%
		<b>IKK15: Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik</b>	<b>Kumulatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Kumulatif	0,00%	0,00%	3,85%	11,54%	19,23%
		<b>IKK16: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat</b>	<b>Tidak Kumulatif</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
		Persentase BUMD dengan kinerja sehat	Tidak Kumulatif	39,29%	39,29%	41,07%	41,07%	42,86%
		<b>IKK17: Jumlah BLUD dengan kinerja sehat</b>	<b>Tidak Kumulatif</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
		Persentase BLUD dengan kinerja sehat	Tidak Kumulatif	5,26%	6,32%	6,32%	7,37%	7,37%
		<b>IKK18: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan</b>	<b>Kumulatif</b>	<b>126</b>	<b>160</b>	<b>193</b>	<b>244</b>	<b>272</b>
SS4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	<b>IKK 19: Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti</b>	<b>Tidak Kumulatif</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>IKK 20: Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti</b>	<b>Kumulatif</b>	<b>70,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>90,00%</b>
		<b>IKK 21: Jumlah</b>	<b>Tidak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					
			Sifat	2020	2021	2022	2023	2024
		Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Kumulatif					
		IKK 22: Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Tidak Kumulatif	0	0	1	2	2
SS5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	IKK 23: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Kumulatif	11	14	19	23	24
		Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	Kumulatif	39,29%	50%	68%	82%	86%
		IKK 24: Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kumulatif	19	22	24	25	26
		Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kumulatif	67,86%	78,57%	85,71%	89,29%	92,86%
		IKK 25: Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	Kumulatif	0	0	0	0	1
		Persentase Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	Kumulatif	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		IKK 26: Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kumulatif	2	2	3	5	10
		Persentase Pemda Kab/Kota	Kumulatif	7,41%	7,41%	11,11%	18,52%	37,04%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					
			Sifat	2020	2021	2022	2023	2024
		dengan MRI $\geq$ Level 3						
		IKK 27: Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Kumulatif	1,11%	2,03%	2,95%	4,24%	4,61%
		IKK 28: Tersedianya Rekomendasi Strategis ( <i>Policy Brief</i> ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Kumulatif	1	1	1	1	1
		IKK 29: Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Kumulatif	44,99%	50,00%	55,01%	60,00%	65,00%
		IKK 30: Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Kumulatif	0	146	342	652	1199
		IKK 31: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	Kumulatif	1	5	7	9	11
		IKK 32: Jumlah BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	Kumulatif	0	1	3	7	11
		Persentase BUMN dengan MRI $\geq$ Level 3	Kumulatif	0,00%	5,88%	17,65%	41,18%	64,71%
		IKK 33: Jumlah BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	Kumulatif	0	0	2	4	5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					
			Sifat	2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase BUMD dengan MRI $\geq$ Level 3	Kumulatif	0,00%	0,00%	7,69%	15,38%	19,23%
		<b>IKK 34: Jumlah BLUD dengan MRI <math>\geq</math> Level 3</b>	<b>Kumulatif</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
		Persentase BLUD dengan MRI $\geq$ Level 3	Kumulatif	0,00%	7,35%	14,71%	19,12%	25,00%
		<b>IKK 35: Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern <math>\geq</math> Level 3</b>	<b>Kumulatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		Persentase BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern $\geq$ Level 3	Kumulatif	0,00%	0,00%	7,69%	15,38%	19,23%
		<b>IKK 36: Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern <math>\geq</math> Level 3</b>	<b>Kumulatif</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		Persentase BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern $\geq$ Level 3	Kumulatif	0,00%	0,00%	4,17%	8,33%	12,50%

### C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2023

Rencana Aksi Kinerja adalah serangkaian kegiatan dan penugasan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam target waktu yang jelas beserta penanggungjawabnya. Dengan membuat rencana aksi kinerja akan memberikan panduan tahapan dan *milestone* pencapaian kinerja, sehingga akan terbentuk komitmen dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang

dengan sumber daya yang tersedia. Rencana aksi kinerja yang disusun diharapkan dapat memberikan peta jalan dalam mencapai kinerja pada akhir tahun yang bersangkutan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mencakup Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) sebagaimana berikut:

**Tabel 3.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	
				Satuan	Total
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.349,00
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	137.919,00
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	113.184,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85,00
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	(%) Persen	80,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1,00
		4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	24,00
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	7,00
		4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	220,00
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	5,00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00
			Jumlah Pemda dengan efektivitas		

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target	
				Satuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)		
		5.3	pengendalian korupsi Baik	Pemda	6,00
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2,00
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1,00
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	22,00
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1,00
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	25,00
		6.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	5,00
		6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	23,00
		6.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00
		6.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00
		6.9	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	4,00
		6.10	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	4,00
		6.11	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	3,00
		6.12	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	1,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00



**Tabel 3.4 Agenda Prioritas Pengawasan (APP)**

No	Kode Topik	Topik Pengawasan	Unit Kerja Rendal	Topik Pelaporan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.a	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	D204	-	-	✓	-
2	A.1.b	Bantuan Operasional Sekolah	D204	-	-	✓	-
3	A.1.c	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	D204	-	-	✓	-
4	A.1.d	Kinerja Pendidikan Tinggi	D204	-	-	✓	-
5	A.1.e	Pemajuan Kebudayaan	D201	-	-	✓	-
6	A.2.a	Sistem Kesehatan Nasional	D203	-	✓	-	-
7	A.2.b	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	D203	-	✓	-	-
8	A.2.c	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	D203	-	✓	-	-
9	A.2.d	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	D203	-	✓	-	-
10	A.2.e	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	D203	-	✓	-	-
11	A.2.f	Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan)	D201	-	✓	-	-
12	A.2.g	Akuntabilitas penanganan Covid-19	D203	✓	-	-	-
13	A.2.h	Percepatan Penurunan Stunting	D204	-	✓	-	-
14	A.2.i	Skema Kesehatan Adaptif	D203	-	✓	-	-
15	A.3.a	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	D205	✓	-	✓	-
16	A.3.b	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	D203	✓	✓	✓	✓
17	A.3.d	Implementasi Bansos APBD	D302	-	-	-	✓
18	A.3.e	Implementasi Bansos APBDesa	D303	-	-	-	✓
19	A.3.f	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	D203	-	-	-	✓
20	B.1.a	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	D103	-	✓	-	✓
21	B.1.b	Infrastruktur SPAM	D103	-	✓	-	✓
22	B.1.c	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	D105	-	✓	-	✓
23	B.2.a	Pembangunan Jalan dan Jembatan	D105	-	✓	-	✓
24	B.2.b	Infrastruktur Jalan Tol	D103	-	✓	-	✓
25	B.2.c	Pembangunan Infrastruktur Kereta	D103	-	✓	-	✓
26	B.2.d	Pembangunan Bandara	D103	-	✓	-	✓
27	B.3.a	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	D204	-	✓	-	✓
28	B.3.b	Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional	D204	✓	-	-	-
29	B.3.c	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	D205	✓	-	-	-
30	C.2.a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	D301	✓	-	-	-

No	Kode Topik	Topik Pengawasan	Unit Kerja Rendal	Topik Pelaporan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		Pemerintah Daerah					
31	C.2.b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	D301	✓	✓	✓	✓
32	C.2.c	Optimalisasi PAD	D301	-	✓	-	-
33	C.2.d	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	D301	-	✓	-	-
34	C.2.e	Efektivitas Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)	D302	-	-	✓	-
35	C.2.g	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	D302	✓	✓	✓	✓
36	C.3.a	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	D303	✓	-	-	-
37	C.3.b	Akuntabilitas Keuangan Desa	D303	✓	✓	✓	✓
38	C.3.c	Akuntabilitas Aset Desa	D303	-	✓	-	-
39	C.4.a	BUMN	D401	-	✓	-	-
40	C.4.b	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	D405	-	✓	-	-
41	C.4.c	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	D403	-	✓	-	-
42	C.4.d	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	D405	-	✓	-	-
43	C.4.e	BUMD (Fokus pada BUMD Aneka Usaha)	D405	-	✓	-	-
44	D.2.a	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	D104	✓	-	-	-
45	D.2.b	Akses Permodalan UMKM	D104	✓	-	-	-
46	D.3.a	P3DN	D504	✓	✓	✓	✓
47	D.3.b	Kemudahan Perizinan Berusaha	D101	-	-	✓	-
48	D.3.f	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	D102	-	-	✓	-
49	D.4.a	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	D104	✓	-	-	-
50	D.4.b	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	D104	✓	-	-	-
51	D.4.c	Dukungan Pengembangan Pariwisata	D104	✓	-	-	-
52	E.1.a	Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional	D501	-	-	✓	-
53	E.1.b	Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul	D501	-	-	✓	-
54	E.1.c	Tata Kelola Pupuk Nasional	D501	-	-	✓	-
55	E.1.d	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	D501	-	-	✓	-
56	E.1.e	Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional	D501	-	-	✓	-
57	E.1.f	Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	D501	-	-	✓	-
58	E.1.g	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan	D501	-	-	✓	-
59	E.1.h	Penanggulangan Hama dan Penyakit	D501	-	-	✓	-
60	E.2.a	Penanganan Pasca Panen	D502	-	-	✓	-
61	E.2.b	Supply Chain Komoditas Pangan	D502	-	-	✓	-

No	Kode Topik	Topik Pengawasan	Unit Kerja Rendal	Topik Pelaporan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
62	E.3.a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	D502	-	-	✓	-
63	E.3.b	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	D302	-	-	✓	-
64	E.3.c	Peningkatan Kualitas, Keamanan, dan Diversifikasi Pangan	D502	-	-	✓	-
65	E.3.d	Efisiensi Industri Pupuk Nasional	D403	-	-	✓	-
66	G.1.a	Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	D304	-	-	-	✓
67	G.1.b	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	D304	✓	✓	✓	✓
68	G.1.c	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	D304	-	-	-	✓
69	G.1.e	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	D504	✓	-	✓	-
70	G.1.g	Manajemen Risiko Badan Usaha	D403	-	✓	-	✓
71	G.2.d	Reforma Agraria	D501	✓	-	-	-
72	G.3.a	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	D202	✓	-	-	-
73	G.3.b	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	D504	-	✓	✓	✓
74	G.3.c	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	D201	-	✓	-	✓

**Tabel 3.5 Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD)**

No	Nama Cluster	Tema Pengawasan	Rendal	Target Pelaporan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Ketahanan Pangan	Program Petani Milenial	D.1.2	-	-	✓	-
2	Pembangunan Ekonomi	Program Gerakan Membangun Desa	D.3.3	✓	-	-	-

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Tahun 2023 ini merupakan turunan dari Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024, arahan dari pusat dan perjanjian kinerja tahun 2023 dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah. Dari 7 sasaran kegiatan, 34 indikator kinerja, 74 topik

pengawasan APP, dan 2 tema pengawasan APPD dalam Dokumen Perjanjian Kinerja, telah disusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 dalam bentuk matrik rencana aksi melibatkan seluruh korwas dan kabag umum dan akan dipedomani oleh seluruh pegawai.

Rencana Aksi diatas memuat target kinerja triwulanan, kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen (PKPT/PKAU/Non PKPT) dan waktu yang akan dilaksanakan, risiko utama penugasan yang dihadapi, anggaran yang tersedia, serta penanggung jawab kegiatan.

Pada dasarnya Rencana Aksi ini merupakan panduan tahapan dan *milestone* pencapaian kinerja yang berfungsi sebagai:

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebesar **Rp53.486.569.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6 DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat**

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Program Pengawasan Pembangunan	7.130.740.000,00
2.	Program Dukungan Manajemen	46.355.829.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>53.486.569.000,00</b>

Secara umum risiko utama yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan antara lain:

1. Keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan yang tersedia dikarenakan waktu penugasan yang berbarengan.
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengawasan.
3. Pedoman pengawasan maupun regulasi yang digunakan sebagai dasar kriteria dalam pelaksanaan penugasan salah/tidak tepat/kurang tepat dan/atau salah menafsirkan/memahami.
4. Bentuk penugasan pengawasan/tools pengawasan yang digunakan salah/tidak tepat/kurang tepat/kurang lengkap.
5. Penugasan pengawasan gagal mengidentifikasi permasalahan yang telah dan/atau sedang terjadi pada obyek pengawasan.
6. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun simpulan hasil pengawasan tidak diperoleh/tidak lengkap.
7. Simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan tidak/kurang didukung dengan kecukupan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Laporan hasil pengawasan terlambat diselesaikan/melewati jadwal yang telah ditentukan.
9. Informasi yang disajikan dalam laporan hasil pengawasan tidak lengkap dan/atau terdapat penyajian yang multi tafsir.

Rincian selengkapnya Rencana Aksi Tahun 2023 termasuk risiko utama penugasan yang dihadapi dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Semoga Rencana Aksi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi BPKP pada bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



**L A M P I R A N**  
**M A T R I K R E N C A N A A K S I**  
**P E R W A K I L A N B P K P P R O V I N S I J A W A B A R A T**  
**T A H U N 2 0 2 3**

**RENCANA AKSI TAHUN 2023**  
**PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan				
						TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	3.349				V		Pengawasan Optimalisasi PAD, Monitoring OPAD, Pengawasan Aset Strategis	1.Keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan yang tersedia dikarenakan waktu penugasan yang berbarengan.		Korwas JFA Bidang APD			V	V	V	
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara	Rupiah (Juta)	137.919				V		Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat	2.Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengawasan.	4.402.000	Korwas JFA Bidang APD			V		V	
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara				113.184					Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	3. Keterbatasan pemahaman auditor terkait teknis pengadaan dan/atau pekerjaan fisik pembangunan yang diawasi		Korwas JFA Bidang APD		V			
												Pengawasan Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	4. Pedoman pengawasan maupun regulasi yang digunakan sebagai kriteria dalam pelaksanaan penugasan salah/tidak tepat/kurang tepat dan/atau salah menafsirkan/ memahami.		Korwas JFA Bidang APD			V		
												Pengelolaan Risiko Sektor Strategis Nasional	5.Bentuk penugasan pengawasan/tools pengawasan yang digunakan salah/tidak tepat/kurang tepat/kurang lengkap.		Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V
												Verifikasi Performance Based Conditions (PBCs)Indonesia Disaster Risk Finance and Insurance (IDRFI)	6.Penugasan pengawasan gagal mengidentifikasi	29.161.637	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
												Verifikasi atas Disbursement Linked Indicator (DLI) Indonesia - Supporting Primary Health Care Reform (I SPHERE) Loan IBRD No.8873-ID		29.161.637	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
												Audit atas Laporan Keuangan DOISP II IBRD 8711-IND & AIIB 000010		126.623.457	Korwas JFA Bidang IPP			V		V



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Audit atas Laporan Keuangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) IDN-1011	permasalahan yang telah dan/atau sedang terjadi pada obyek pengawasan.	211.039.095	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Pengawasan Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi	7.Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun simpulan hasil pengawasan tidak diperoleh/tidak lengkap.	58.323.274	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Pengawasan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	8.Simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan tidak/kurang didukung dengan kecukupan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.	150.471.000	Korwas JFA Bidang IPP		V			
										Pengawasan Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	9.Laporan hasil pengawasan terlambat diselesaikan/melewati jadwal yang telah ditentukan.	84.415.638	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Pengawasan atas Pembangunan Bandara di Jawa Barat	10.Informasi yang disajikan dalam laporan hasil pengawasan tidak lengkap dan/atau terdapat penyajian yang multi tsiafr.	23.317.500	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Pengawasan Penanganan Pasca Panen		35.000.000	Korwas JFA Bidang Investigasi				V	
										Pengawasan atas Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI) pada Pemerintah Provinsi			Korwas JFA Bidang IPP		V			
										Evaluasi Percepatan Penurunan stunting tahun 2023 di Jawa Barat	11. Saran/rekomendasi hasil pengawasan belum ditindaklanjuti secara optimal.		Korwas JFA Bidang IPP			V		
										Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang IPP				V	
										Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang IPP				V	

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Pengawasan atas Kinerja Pendidikan Tinggi di Jawa Barat		Korwas JFA Bidang IPP					V	
										Pengawasan Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional		Korwas JFA Bidang IPP		V				
										Pengawasan Sarana Prasarana Pendidikan di Jawa Barat		Korwas JFA Bidang IPP					V	
										Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Rujukan		Korwas JFA Bidang IPP				V		
										Pengawasan Bauran Program Kesejahteraan Sosial	116.646.548	Korwas JFA Bidang IPP		V	V	V	V	
										Pengawasan reformasi sistem Kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes		Korwas JFA Bidang IPP				V		
										Pengawasan Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit di Jawa Barat		Korwas JFA Bidang IPP				V		
										Pengawasan Sistem Kesehatan Nasional di Jawa Barat		Korwas JFA Bidang IPP				V		
										Pengawasan Skema Kesehatan Adatif		Korwas JFA Bidang IPP				V		
										Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem		Korwas JFA Bidang IPP						V
										Pengawasan atas Tata Kelola Peredaran Obat Sirop	58.323.274	Korwas JFA Bidang IPP		V				
											4.401.887	Korwas JFA Bidang AN		V				
										Pengawasan atas Pengadaan ASN Tahun 2023	87.484.911	Korwas JFA Bidang IPP						V

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Pengawasan FIFA U-20 World Cup 2023 di Jawa Barat		58.323.274	Korwas JFA Bidang IPP					V
										Pengawasan Akuntabilitas Penanganan Covid-19 di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang IPP		V			
										Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Primer			Korwas JFA Bidang IPP			V		
										Pengawasan pembangunan bandara		4.401.886	Korwas JFA Bidang AN			V		V
										Pengawasan Akuntabilitas Anggaran Pemilu di Jawa Barat (Bidang IPP2)			Korwas JFA Bidang IPP		V			
										Pengawasan atas Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu dan Pemilukada di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang IPP					V
										Penguatan Inovasi dan Teknologi Kesehatan (Digitalisasi Layanan Kesehatan)			Korwas JFA Bidang IPP			V		
										Evaluasi Pemajuan Kebudayaan pada Daerah A			Korwas JFA Bidang IPP				V	
										Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan		116.646.548	Korwas JFA Bidang IPP					V
										Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah		150.471.000	Korwas JFA Bidang Investigasi			V	V	
										Pengawasan atas Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)		24.937.500	Korwas JFA Bidang Investigasi		V		V	

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Pengawasan atas Penanggulangan Hama dan Penyakit		16.800.000	Korwas JFA Bidang Investigasi				V	
										Pengawasan atas Tata Kelola Pupuk Nasional		16.500.000	Korwas JFA Bidang Investigasi				V	
										Pengawasan terhadap Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional		16.500.000	Korwas JFA Bidang Investigasi				V	
										Pengawasan terhadap Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan		16.500.000	Korwas JFA Bidang Investigasi				V	
										Pengawasan Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional		16.500.000	Korwas JFA Bidang Investigasi				V	
										Pengawasan atas P3DN		110.250.000	Korwas JFA Bidang Investigasi		V	V	V	V
										Pengawasan atas Reforma Agraria		35.000.000	Korwas JFA Bidang Investigasi		V			
										Pengawasan atas Supply Chain Komoditas Pangan		35.000.000	Korwas JFA Bidang Investigasi				V	
										Pengawasan atas Peningkatan Produksi Pakan Ternak			Korwas JFA Bidang Investigasi				V	
										Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan) pada BUMN		211.039.095	Korwas JFA Bidang AN		V	V	V	V
										Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM (CSR BUMN)		13.093.750	Korwas JFA Bidang AN		V			
										Pengawasan atas Infrastruktur Jalan Tol pada BUMN			Korwas JFA Bidang AN			V		V

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Pengawasan atas Efisiensi Industri Pupuk Nasional			Korwas JFA Bidang AN				V	
										Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	16.625.000		Korwas JFA Bidang Investigasi		V			
										Pengawasan atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	8.238.938		Korwas JFA Bidang AN		V			
										Pengawasan P3DN pada BLU/D dan BUMD di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang Investigasi			V	V	V
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85				V	Pengawasan terhadap Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	1. Keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan yang tersedia dikarenakan waktu penugasan yang berbarengan.	31.500.000	Korwas JFA Bidang Investigasi		V		V	
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan	Kegiatan Prioritas Daerah	2				V	Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Diversifikasi Pangan	2. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengawasan.	42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP				V	
										Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	3. Bentuk penugasan pengawasan/tools pengawasan yang digunakan salah/tidak tepat/kurang tepat/kurang lengkap.	42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP				V	
										Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul		42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP				V	
										Audit Kinerja Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)		42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP				V	

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Verifikasi Pencapaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Additional Emergency Response to Covid-19 Program	4. Penugasan pengawasan gagal mengidentifikasi permasalahan yang telah dan/atau sedang terjadi pada obyek pengawasan.	29.161.637	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Audit atas Laporan Keuangan STRENGTHENING OF NATIONAL REFERRAL HOSPITALS AND VERTICAL TECHNICAL UNITS PROJECT LOAN IDN 1031	5. Simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan tidak/kurang didukung dengan kecukupan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.	42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Audit atas Laporan Keuangan Improving Proyek IPDMIP Loan IFAD pada Kementerian Pertanian - 2000001445	6. Informasi yang disajikan dalam laporan hasil pengawasan tidak lengkap dan/atau terdapat penyajian yang multi tafsir.	84.415.638	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)		683.264.016	Korwas JFA Bidang IPP		V	V	V	V
										Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	7. Saran/rekomendasi hasil pengawasan belum ditindaklanjuti secara optimal.	168.831.276	Korwas JFA Bidang IPP				V	
										Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Limbah Setempat		58.323.274	Korwas JFA Bidang IPP					V
										Verifikasi Capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Percepatan Pencegahan Stunting (Investing in Early Years Program)		87.484.911	Korwas JFA Bidang IPP			V		V

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Pengawasan atas Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada BPS Kab/Kota		58.323.274	Korwas JFA Bidang IPP		V		V	
										Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM		42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP		V			
										Pengawasan atas Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur Akses Internet dan Komunikasi		116.646.548	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata (DPSP dan KSPN)		42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP		V			
										Pengawasan Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata di Jawa Barat		42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP		V			
										Pengawasan Dukungan Pengembangan Pariwisata di Jawa Barat		42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP		V			
										Pengawasan atas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri		42.207.819	Korwas JFA Bidang IPP				V	
										Pengawasan Infrastruktur Jalan Tol		84.415.638	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Pengawasan atas Infrastruktur SPAM di Jawa Barat		84.415.638	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Kereta di Jawa Barat		84.415.638	Korwas JFA Bidang IPP			V		V

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Pengawasan Kemudahan Perizinan Berusaha di Jawa Barat		58.323.274	Korwas JFA Bidang IPP				V	
										Verifikasi Hasil Capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) ADB/AIF No. 3529/8327-INO		58.323.274	Korwas JFA Bidang IPP			V		V
										Reviu Tata Kelola PSN Kawasan Ekonomi Khusus		8.803.680	Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V
										Reviu Tata Kelola PSN Pengembangan Ekonomi Kawasan		8.803.774	Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V
										Reviu Tata Kelola PSN PSEL		17.607.547	Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V
										Pengawasan atas Bauran Program Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang Investigasi		V	V	V	V
										Pengawasan P3DN Pemerintah Daerah		130.937.500	Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V
										Pengawasan atas Dukungan Pengembangan Pariwisata		26.187.500	Korwas JFA Bidang APD		V			
										Pengawasan atas Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata		26.187.500	Korwas JFA Bidang APD		V			
										Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)		9.580.000	Korwas JFA Bidang APD			V		



No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Program Gerakan Membangun Desa dalam rangka pembangunan Desa yang Mandiri di Wilayah Provinsi Jawa Barat		92.940.000	Korwas JFA Bidang APD		V			
										Program Petani Milenial Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat		92.940.000	Korwas JFA Bidang APD				V	
										Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN) di Pemda Kab/Kota		26.187.500	Korwas JFA Bidang APD		V			
										Pengawasan atas Produktivitas dan Daya Saing UMKM Daerah		26.187.000	Korwas JFA Bidang APD		V			
										Pengawasan Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Pemda Kabupaten/Kota			Korwas JFA Bidang APD					V
										Pengawasan Implementasi Bansos APBDesa di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang APD					V
										Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting Pemda Kab/Kota di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang APD			V		
										Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah			Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V
										Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah			Korwas JFA Bidang APD				V	

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Pengawasan atas Implementasi Bansos APBD		15.016.129	Korwas JFA Bidang APD					V
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintah pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	(%) Persen	80				V		Monitoring terhadap SIMA-X *)	1. Bidang/unit kerja tidak memasukkan Insilwas/SHP dalam SIMA-X. 2. Penginputan Insilwas/SHP dalam SIMA-X tidak dilakukan secara tepat waktu. 3. Unit kerja tidak melakukan monitoring tindak lanjut							
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1				V		Pengawasan atas Akuntabilitas BUMD (BPD)	1. Risiko fasilitator kurang mampu/kompeten dalam melakukan penugasan. 2. Mitra tidak memahami proses bisnis dalam penilaian mandiri.		Korwas JFA Bidang AN			V		
		4.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	24				V		Pengawasann atas Akses Permodalan UMKM BUMD	3. Pedoman pengawasan maupun regulasi yang digunakan sebagai kriteria dalam pelaksanaan penugasan salah/tidak tepat/kurang tepat dan/atau salah menafsirkan/ memahami.	13.093.750	Korwas JFA Bidang AN		V			
										Pengawasan tata kelola cadangan pangan pusat		8.238.938	Korwas JFA Bidang AN				V	
										Pengawasan BUMD Aneka Usaha			Korwas JFA Bidang AN			V		
										Pengawasan atas Infrastruktur SPAM pada BU Jasa Air di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang AN			V		V
										Pengawasan atas BUMD Jasa Air		4. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun simpulan hasil pengawasan tidak diperoleh/tidak lengkap.		Korwas JFA Bidang AN			V	

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	7			V		Pengawasan atas Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional pada BLUD Kesehatan			Korwas JFA Bidang AN			V		
										Pengawasan atas Penyelenggaraan Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Rujukan pada BLUD Kesehatan			Korwas JFA Bidang AN			V		
										Pengawasan atas Akuntabilitas BLUD Kesehatan			Korwas JFA Bidang AN			V		
										Pengawasan Kinerja BLU Perguruan Tinggi	8.238.938		Korwas JFA Bidang AN				V	
		4.4	Jumlah	BUMDes	220			V										
		4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan	BUMDes	5			V		Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUM Desa	5.011.750		Korwas JFA Bidang AN				V	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100			V		Audit Investigasi; Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; Pemberian Keterangan Ahli; Penugasan terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan; Audit Klaim *)	1. Adanya tuntutan hukum terhadap hasil pengawasan. 2. Majelis hakim dan/atau Penasihat hukum terdakwa menolak ahli dari BPKP untuk memberikan keterangan ahli di persidangan							
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	85			V			3. Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan							

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
											negara. 4. Laporan hasil pengawasan dibenturkan/ di per bandingkan/dipertentangkan dengan laporan hasil pengawasan BPKP lainnya dan/atau laporan hasil pengawasan BPK/APIP lainnya.							
		5.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	6				V		PKPT ini menyatu dengan penugasan PKPT terkait pencapaian Sasaran Kegiatan Nomor 6	Sama dengan risiko untuk Sasaran Kegiatan Nomor 6							
		5.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2				V		Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN		32.955.752	Korwas JFA Bidang AN			V		
										Pengawasan atas BUMN di Jawa Barat			Korwas JFA Bidang AN			V		

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan						
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
										Untuk pencapaian IKK 5.4 termasuk juga penugasan PKPT terkait pencapaian Sasaran Kegiatan Nomor 6											
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Provinsi	1			V		Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA (Provinsi)	1. Tim fasilitator/ evaluator kurang mampu/kompeten dalam melakukan penugasan.  2. Mitra kerja kurang memahami proses bisnis dalam menjalankan penilaian mandiri.  3. Mitra kerja kurang memahami dalam melaksanakan tupoksi terkait dengan obyek yang diawasi.  4. Pedoman Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP/SPIP/MRI tidak dipahami pengguna baik oleh asesor (K/L/D) maupun tim evaluator (BPKP).  5. Pedoman pengawasan maupun regulasi yang digunakan sebagai kriteria dalam pelaksanaan penugasan salah/tidak tepat/kurang tepat dan/atau salah	58.200.000	Korwas JFA Bidang P3A				V	V			
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/Kota	22			V	Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA (Kab/Kota)	Korwas JFA Bidang P3A							V	V			
									Bimtek/Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah	Korwas JFA Bidang P3A								V			
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Provinsi	1				V	Pengawasan Maturitas SPIP/MRI Pemerintah Daerah				Korwas JFA Bidang APD						V	
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	25				V												
		6.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/Kota	5				V												

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	23				V	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	menafsirkan/ memahami.  6. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun simpulan hasil pengawasan tidak diperoleh/tidak lengkap.	4.880.616	Korwas JFA Bidang APD					V
										Peningkatan Opini LKPD	7. Simpulan dan rekomendasi hasil pengawasan tidak/kurang didukung dengan kecukupan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.	4.880.616	Korwas JFA Bidang APD		V			
										Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		4.880.616	Korwas JFA Bidang APD			V		
										Pengawasan Efektivitas Dana Transfer Umum			Korwas JFA Bidang APD				V	
										Bimtek Implementasi FMIS Pada Pemda / Pengelolaan Keuangan Daerah		19.522.463	Korwas JFA Bidang APD					V
										Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V
		6.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25				V	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)		22.524.259	Korwas JFA Bidang APD			V		V
										Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa		3.332.640.000	Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V
										Pengawasan atas Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa		15.016.129	Korwas JFA Bidang APD		V			
										Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa			Korwas JFA Bidang APD		V	V	V	V

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan				
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
										Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)		52.020.000	Korwas JFA Bidang P3A			V		V	
		6.8 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25				V		Tata Kelola Aset Desa		22.524.194	Korwas JFA Bidang APD			V		V	
										Akuntabilitas Aset Desa		15.016.129	Korwas JFA Bidang APD			V			
		6.9 Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	BUMD	4				V		Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha			Korwas JFA Bidang AN					V	
		6.10 Jumlah BLUD	BLU/D	4				V											
		6.11 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI ≥ Level 3	BUMD	3				V											
		6.12 Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI ≥ Level 3	BLU/D	1				V											

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (PKPT/ PKAU/ Non PKPT)	RISIKO UTAMA PENUGASAN	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
						TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75				V		Penilaian RB Unit Kerja	1. Minimnya pemahaman personil Unit Kerja terkait penerapan ZI/SAKIP/SPIP/MR 2. Pelaksanaan penerapan PM ZI/SAKIP/SPIP/MR belum dilaksanakan secara optimal	4.588.040.000	Korwas JFA Bidang P3A dan Kabag Umum					
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82				V		Koordinasi Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP)					V	V	V	V
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70				V		Penilaian SPIP								
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100				V		Penilaian MR Unit Kerja								
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75				V		Survey Layanan Eksternal				Responden tidak memberikan jawaban				
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95				V		Pengelolaan Keuangan ur				Data dukung penyusunan lap tidak lengkap dan penyusunan Lap. Keuangan tidak sesuai SAP				
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80				V		Pengelolaan BMN unit ker				Penetapan nilai limit penghapusan barang tidak ada dasarnya				

Keterangan: Tanda \*) menunjukkan kegiatan Pengawasan Non PKPT baik yang berasal dari BPKP maupun *stakeholders*.



**PKAU TAHUN 2023****PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT**

Sumber : SIMA PERENCANAAN

No	ID	Kode	Jenis Sektor	Nama KAP	PJ KAP	Unit Kerja	Nama PKAU	Bidwas	RMP	Triwulan	Aksi
1	1680	K.2.e.00.001680	NON_APDP	Layanan Perkantoran	SU03	PW10	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
2	1678	K.2.e.00.001678	NON_APDP	Layanan Perkantoran	SU03	PW10	Gaji dan Tunjangan	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
3	1677	K.2.c.00.001677	NON_APDP	Layanan Manajemen Dukungan Pengawasan	SU01	PW10	Koordinasi/Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengawasan dan Dukungan Pengawasan	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
4	1675	K.2.b.00.001675	NON_APDP	Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB	SU01	PW10	Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
5	1674	K.2.b.00.001674	NON_APDP	Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB	SU01	PW10	Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP dan RB	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
6	1673	K.2.a.00.001673	NON_APDP	Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	SU01	PW10	Layanan Pengembangan Kompetensi	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
7	1666	K.2.a.00.001666	NON_APDP	Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	SU01	PW10	Layanan Umum	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
8	1664	K.2.a.00.001664	NON_APDP	Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	SU01	PW10	Layanan Komunikasi dan Informasi	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
9	1660	K.2.a.00.001660	NON_APDP	Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	SU01	PW10	Layanan SDM	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
10	1655	K.2.a.00.001655	NON_APDP	Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	SU01	PW10	Layanan Keuangan	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
11	1654	K.2.a.00.001654	NON_APDP	Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	SU01	PW10	Layanan Perencanaan dan Evaluasi	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
12	1651	K.2.f.00.001651	NON_APDP	Layanan Sarana Internal	SU05	PW10	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	
13	1649	K.2.f.00.001649	NON_APDP	Layanan Sarana Internal	SU05	PW10	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Bagian Tata Usaha	Januari	1234	